

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 07 Nomor 01, Januari 2024 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i1.2769](https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2769)

## Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama

**Bilal Ahmad Febriansyah<sup>1</sup>, Ilham Manando<sup>2</sup>, Angga Wira Kusuma<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia.

### Info Artikel

#### Penulis Korespondensi:

**Bilal Ahmad Febriansyah**

✉ [bilalahmadfebriansyah48@gmail.com](mailto:bilalahmadfebriansyah48@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 02-11-2023

Revisi: 20-11-2023

Diterima: 25-12-2023

Diterbitkan: 30-01-2024

**Hal:** 60 - 72

#### Kata Kunci:

[Politik Identitas, Nasionalisme, Agama, Indonesia.]

### Abstrak

[Demokratisasi liberal juga secara politis menjadi dasar realisasi diri individu. Jaminan kebebasan individu dalam konstitusi Indonesia mencerminkan popularitas sistem demokrasi tersebut. Namun, kebebasan ini pada akhirnya menjelaskan pemisahan identitas (agama, suku, bahasa, gender, dll) di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan politik kebangsaan. Agama negara dan nasionalisme adalah dua identitas yang diperbincangkan di Indonesia. Politik politik identitas menyempit hingga muncul klaim-klaim murni bahwa satu kelompok kepentingan lebih baik dari yang lain, dan persoalan kepentingan tersebut mulai memecah belah bangsa-bangsa yang sebelumnya menyimpan perbedaannya. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan realitas politik identitas di Indonesia saat ini, dengan fokus pada dua kelompok identitas: kelompok agama dan kelompok nasionalis. Metode kualitatif dan tinjauan literatur digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Studi ini menemukan bahwa perpecahan yang diciptakan oleh kelompok-kelompok politik berdasarkan identitas agama dan nasionalisme, dibatasi oleh terjadinya krisis kepercayaan pada pemerintah, penyebaran laporan palsu, persekusi, pengkhianatan, negara demokrasi, dll, menyebabkan Destabilisasi.]



Copyright © 2024 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.



## **I. PENDAHULUAN**

Nyatanya, perbaikan sistem demokrasi yang terus menerus dicanangkan oleh berbagai pihak dalam pemerintahan Indonesia tidak selalu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin hak seluruh warga negara, sehingga kebebasan merupakan kesempatan yang sama bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Demokrasi Indonesia sendiri pada dasarnya masih dinamis dengan isu-isu kebhinnekaan yang sering menimbulkan disharmoni antar kelompok. Perbedaan karena keragaman Indonesia telah mencatat sejarah sebagai faktor penting dalam menciptakan konflik seperti agama, suku, suku, dll.

Konflik-konflik tersebut tidak hanya berkembang sebagai konflik antara satu identitas, tetapi memasuki fase baru sebagai konflik antar identitas. Perluasan konflik antar identitas ini sering kita jumpai dalam konteks proses demokratisasi, lebih tepatnya sebagai “demokrasi liar”. “Demokrasi liar” tidak terbatas pada konsep demokrasi yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bernegara, tetapi kebebasan tanpa batas yang ditawarkan demokrasi di Indonesia saat ini terus menerus menimbulkan keresahan, tanpa ragu, untuk menyentuh kerajaan kelompok agama. Keyakinan Ketidaksepakatan dan pendapat antar agama merupakan bagian integral dari urusan politik saat ini.

Masalah ini kemudian diperparah dengan adanya kelompok yang mengklaim bahwa nasionalisme adalah filosofi yang harus dianut bangsa Indonesia untuk memahami dan menghormati perbedaan yang diakui sejak awal seiring dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominasi oleh identitas suku, agama, ras, adat istiadat, dll. Ini membentuk kelompok yang solid yang menunjukkan ketegasan ke arah politik identitasnya. Saat ini, konflik antara identitas nasionalis dan identitas agama semakin intensif, hingga mengganggu stabilitas negara. Perbedaan identitas politik

antara kedua kelompok identitas ini menimbulkan pertanyaan yang berbeda bagi masyarakat luas baik karena propaganda maupun klaim kebenaran lintas kelompok.<sup>1</sup>

Integrasi ke dalam suatu kelompok atau kelompok tertentu tentu saja tidak terlepas dari adanya rasa persamaan identitas. Identitas atau diri ini ada dalam berbagai bentuk dan tipe, seperti identitas gender, agama, etnis, pekerjaan, dll. Jadi asosiasi berdasarkan identitas bersama membentuk kelompok identitas. Politik identitas sendiri merupakan penyempurnaan dari identitas politik yang dianut warga negara dalam kaitannya dengan orientasi politiknya. Politik identitas muncul dari sebuah kelompok sosial yang merasa terintimidasi dan terdiskriminasi oleh aturan negara dan pemerintahan dalam sistem pemerintahan.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya politik identitas dalam urusan kenegaraan. Karena diskriminasi yang sangat kuat terhadap kulit putih dan kulit hitam, politik identitas di Amerika Serikat mendapat perhatian luas di berbagai kalangan untuk pertama kalinya.<sup>2</sup>

Munculnya politik identitas dalam dinamika politik Indonesia yang sangat beragam tidak terlepas dari ketidakadilan dan kesetaraan yang dituntut oleh setiap kelompok atau kelas sosial tertentu. Lebih lanjut, perbedaan yang menjadi ukuran utama kebhinekaan Indonesia mengakibatkan politik identitas Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Mengabaikan konflik yang mendasari politik identitas yang berbeda menciptakan ketidakstabilan negara.

Manuel Castells Pengertian identitas dalam politik identitas berasal dari institusi dominan yang mengidentifikasi dan menginternalisasi

---

<sup>1</sup> Manuel Castells, 'The Power of Identity. The Information Age: Economy', *Society and Culture*, 2.3 (1997), 72–75.

<sup>2</sup> Yeni Sri Lestari, 'Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama', *Journal of Politics and Policy*, 1.1 (2018), 19–30.

kelompok tertentu melalui *stereotype* dan *stereotype*. Castells selanjutnya mengidentifikasi konstruksi identitas menurut tiga model, yaitu:

1. *Legitimizing* atau legitimasi Identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
2. *Resistance identity* atau resistensi identitas Identitas yang dilekatkan oleh aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain. Konstruksi identitas ini kemudian dikatakan oleh Coulhoun sebagai politik identitas.
3. *Project identity* atau proyek identitas Konstruksi pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.
4. Konstruksi politik identitas Indonesia muncul dari masa kolonial hingga kemerdekaan dan menemukan kekuatannya. Kesetaraan identitas sebagai warga negara yang merdeka menghasilkan sikap nasionalisme yang tinggi pada masyarakat, yang menunjukkan politik identitasnya dalam pelaksanaan praktik ketatanegaraan. Saat itu, nasionalisme tidak hanya menjadi dimensi utama politik identitas Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang didominasi umat Islam juga sangat mempengaruhi sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Fakta bahwa umat Islam ingin menempatkan identitas

agamanya di atas tatanan negara bukanlah sekedar teatrical, tetapi memiliki sejarah yang panjang. menunjukkan bahwa nasionalisme dan Islam telah lama hidup berdampingan di Indonesia dan telah menciptakan hubungan yang harmonis.<sup>3</sup>

Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama konflik politik, terutama jika menyangkut ketegangan antara lapisan atas dan bawah atau antara mayoritas dan minoritas. Tak terkecuali Indonesia, penekanan Pancasila pada demokrasi liberal menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dipandang sebagai ancaman terhadap kebhinekaan Indonesia, khususnya agama minoritas.<sup>4</sup> Hal ini kemudian menimbulkan konflik politik. Studi politik membuat perbedaan yang jelas antara identitas politik dan identitas politik. Identitas politik diartikan sebagai struktur yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam ikatan komunitas politik.

Sementara itu, identitas politik merupakan mekanisme politik untuk mengorganisir identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan instrumen politik. Penelitian politik identitas mencakup dua kategori identitas yang diakui, identitas sosial dan identitas agama sebagai subjek. Identitas sosial meliputi identitas agama, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas, dimana identitas sosial menentukan posisi individu dalam hubungan atau interaksi sosial. Sementara itu, identitas politik mencakup kebangsaan dan kewarganegaraan, dimana identitas politik ini menentukan posisi individu dalam masyarakat melalui rasa memiliki dan sekaligus menunjukkan posisi subjek lain dalam arti keberbedaan

Politik identitas kemudian lebih dimaksudkan sebagai instrumen

---

<sup>3</sup>.Mutiara Mutiara, 'Politik Identitas Di Indonesia Antara Nasionalisme Dan Agama', *MANDAR: Social Science Journal*, 1.2 (2022), 100–105.

<sup>4</sup> Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, Hal. 109-126.

politik dalam pencarian kekuasaan. Pentingnya politik identitas sebagai alat politik diungkapkan oleh Kemala Chandakirana yang menjelaskan bahwa pemimpin menggunakan politik identitas sebagai retorika politik, dengan istilah “kita” berarti “pribumi” yang menginginkan kekuasaan dan “pendatang baru” yang meninggalkan membutuhkan kekuasaan. (Muhtar Haboddin). Dari sini dapat disimpulkan bahwa politik identitas hanyalah alat penguasa untuk memanipulasi dan menghimpun kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini tidak lain adalah kecenderungan mutlak dari seorang pemimpin yang berkuasa<sup>5</sup>. menyebutkan bahwa politik identitas memiliki tiga ciri, yaitu:

1. Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang pada prinsipnya di tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya.
2. Gerakan politik identitas memiliki suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar.
3. Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.

Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Seperti halnya di Indonesia, politik identitas yang saat ini menjelma dalam dua kekuatan besar yang didominasi oleh kaum nasionalis dan kaum muslim, apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara. Pertentangan

---

<sup>5</sup> Klaus von Beyme (Muhtar Haboddin, 2012:120-121)

antara kedua-dua identitas tersebut dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki political will dalam menengahi isu ini. Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan melainkan juga kepentingan masyarakat luas, sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan.<sup>6</sup>

Politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membentuk dominasi arus besar untuk sebuah kepentingan kelompok yang memeras dan menyingkirkan kelompok lawan atau kelompok minoritas. Politik identitas yang mendominasi Indonesia saat ini adalah politik identitas keagamaan yang menghadirkan eksklusivisme kelompok mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini juga diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan.<sup>7</sup>

Kajian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap. Persamaan kajian terletak pada persoalan politik identitas. Dalam keberlangsungannya di negara hukum modern, hukum bukan hanya berkedudukan sebagai instrumen pengendalian sosial (*law is a social control*), namun juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat secara luas kepada perubahan yang diinginkan (*law is a social engineering*). Artinya hukum menjadi instrumen yang menentukan kemajuan, keadaban serta kesejahteraan negara.<sup>8</sup> yang menjadi isu utama dalam sistem pemerintahan sehingga menyebabkan munculnya konflik.

---

<sup>6</sup> Ali Machsana Moesa, *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (LKIS Pelangi Aksara, 2007).

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Ketujuh Belas', *Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung*, 2002.

<sup>8</sup> Zainudin Hasan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan tetapi menekankan kepada karakter alamiah sumber data. Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi dengan cara menganalisis persoalan politik identitas di Indonesia berdasarkan isu nasionalisme dan isu agama. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang bersifat analisis-deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari keadaan yang dikaji berkaitan dengan persoalan politik identitas antara identitas nasionalisme dan identitas.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik identitas di Indonesia dihiasi dengan beragam isu mengenai pertentangan antara kaum yang mengusung identitas nasionalisme dan kaum yang mengusung identitas agama. Dalam persoalan ini muncul sebuah klaim kebenaran antara keduanya mengenai keunggulan atau eksklusivisme dari masing-masing identitas yang mereka gaungkan. Ditilik lebih mendalam, sejarah panjang kemerdekaan Indonesia hingga saat ini telah membuktikan bahwa landasan keagamaan (Islam) telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi terbentuknya bangsa Indonesia, tidak terkecuali dengan dibentuk dan disepakatinya Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Namun begitu, perebutan kekuasaan politik telah kembali mengulang sejarah kelam dengan menjadikan politik identitas keagamaan sebagai alat propaganda kekuasaan.

Persoalan nasionalisme jauh sebelumnya telah dimaknai bersama sebagai semangat antar suku, agama, ras, kelas, dll di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang menciptakan integrasi harmonis hingga tercapailah kemerdekaan Indonesia atas dasar kerjasama antar keragaman tersebut. Namun saat ini, nasionalisme lebih dipandang sebagai solidaritas nasional dari

kelompok-kelompok minoritas yang merasa terintimidasi dengan kelompok agama mayoritas. Persoalan terpecahnya politik identitas di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang dimotori oleh elit politik untuk mendapatkan hingga mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik identitas di Indonesia. Perpecahan antara kelompok nasionalis dan agama dianggap mampu memberikan peluang bagi menutupi ketidakmampuan pemerintahan yang berkuasa saat ini dalam menangani isu-isu kenegaraan terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat luas menyebabkan munculnya kepentingan politik guna menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik. Berbagai kebijakan yang banyak memunculkan 27aker27c di masyarakat antara lain kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga bahan pokok makanan, kenaikan nilai tukar rupiah, dll. Pertentangan antar politik identitas di Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim pemilihan umum (pemilu) yang cenderung membawa-bawa persoalan keagamaan harus dipisahkan dengan persoalan negara. Berujung kepada kasus penistaan agama, menjadikan kelompok agama minoritas merasa didiskriminasi oleh agama mayoritas. Polemik ini kemudian berlanjut hingga kepersoalan yang sangat subtansif untuk tidak mencampuradukan agama ke dalam persoalan politik.

Penyelenggaraan pemilu acapkali menjadi ajang perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, hingga agamapun menjadi korbannya. Proses pemilu inilah yang menjadi titik utama berkembangnya perpecahan antara semangat nasionalisme dengan keagamaan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana ditambah dengan kerakusan

untuk mempertahankan kekuasaan menjadikan politik identitas sebagai kendaraan yang paling ampuh untuk mendapatkan suara rakyat.

Dilema etika yang timbul dari kewajiban yang saling bertentangan, seperti tekanan dari atasan atau pengaruh eksternal, ditemukan berkontribusi pada berkurangnya profesionalisme dan peningkatan keengganan (Ulum, 2018). Ini termasuk memperkuat sistem pendukung organisasi, seperti menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan pengambilan keputusan. Selain itu, menangani norma-norma sosial dan mempromosikan budaya transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi pengaruh tekanan eksternal dan dilema etika.<sup>9</sup>

Penggiringan dan pembentukan opini publik melalui media massa mengenai semangat keberagaman dan nasionalisme telah memecahbelah kehidupan berbangsa. Padahal tidak dapat dipungkiri, bahwa agama mayoritas di Indonesia telah lama mengamalkan prinsip-prinsip nasionalisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, seperti disetujuinya Pancasila sebagai landasan negara hingga toleransi dalam beragama dengan mengakui keberadaan agama minoritas.

Isu-isu mengenai politik identitas harus dilihat siapa, apa dan bagaimana kepentingan itu mendasarinya. Kepentingan kelompok elit yang menggunakan politik identitas untuk mengangkat kembali isu primordialisme dengan menjebak fanatisme seseorang atau kelompok dalam hal keagamaan telah melahirkan perpecahan yang begitu besar dan menjadi ancaman bagi nasionalisme negara.

---

<sup>9</sup> Zainudin Hasan. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum.

Namun, yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah menganalisa penyebab terjadinya permasalahan regulasi di Indonesia, supaya dalam menentukan solusi penyelesaian masalah regulasi dapat disusun secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Beberapa kajian yang ada, telah menganalisis penyebab konflik peraturan perundang-undangan ini melalui perspektif normatif dan kelembagaan.<sup>10</sup>

Pertentangan politik identitas kemudian diperkeruh dengan berbagai pemberitaan di media massa yang saling menuding kebenaran dan kesalahan dari kedua belah pihak. Peningkatan jumlah pemberitaan, bahkan dalam hitungan menit menyebabkan tidak terkendalinya isu mengenai politik identitas dan memunculkan persoalan baru tentang penyebaran berita yang belum pasti kebenarannya bahkan sebagian besar berisi kebohongan (hoax).

Ketidaktepatan arah kebijakan dalam menangani pertentangan politik identitas ini dapat menyebabkan matinya penegakkan demokrasi di Indonesia. Sehingga segala bentuk perpecahan yang mungkin ditimbulkan dari kedua kelompok politik identitas ini harus dapat diminimalisir melalui peran pemerintah dan juga masyarakat. Seharusnya keragaman yang ada di Indonesia dijadikan sebagai wadah persatuan yang memiliki nilai perbedaan yang membangun, bukan sebaliknya.

Political will dari pemerintah Indonesia menjadi solusi utama untuk mengakhiri konflik yang terjadi antar kedua kelompok politik identitas ini. Kedaulatan negara hanya tercapai dengan mengutamakan kepentingan nasionalisme negara yang didalamnya terdapat semangat keragaman antar agama, suku, ras, kelas dll. Kemandirian pemerintah dalam menyelenggarakan sistem

---

<sup>10</sup> Zainudin Hasan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

pemerintahan mencerminkan keberhasilan pemerintah karena mampu membentuk kebijakan yang sepenuhnya bagi kedaulatan warga negaranya bukan atas dasar intervensi asing yang mengusung demokrasi seluas-luasnya melalui paham sekuler, pluralis dan liberal dengan mengabaikan fakta sejarah kebangsaan.

#### **IV. PENUTUP**

Perpecahan yang muncul karena pengelompokan politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita hoax, persekusi, 28aker, terbatasnya ruang demokrasi, dll. Substansi dari keberadaan politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang menyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia saat ini. Identitas agama (Islam) merupakan salah satu pondasi tegaknya identitas nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga seharusnya politik identitas di Indonesia harus ditanggapi dengan memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya pada publik untuk membuktikan bahwa agama (Islam) dan nasionalisme sejalan dan memiliki tujuan yang satu, yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia, bukan membiarkan pertentangan antar keduanya semakin meluas dengan menghadirkan kebijakan dan berita-berita yang mengandung propaganda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2003). *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*. Vol II. Blackwell Publishing: Australia.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, Hal. 109-126.
- Zainudin Hasan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (2023) Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
- Harahap, FR. (2014). *Politik Identitas Berbasis Agama*. Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas. Yogyakarta.
- Heller, A dan Punsher, S. (1995). *Biopolitical Ideologies an Their Impact on the New Social Movements*. A New Handbook of Political Societies. Blackwell Oxford.
- Zainudin Hasan. (2023). *Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum*.
- Heyes, C. (2007). Identity Politics Stanford Encyclopedia of Philosophy. Diakses 13 September 2018, dari: [Plato.Stanford.edu/entries/identitypolitics](http://Plato.Stanford.edu/entries/identitypolitics).
- Maarif, AS. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Democracy Project: Jakarta.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Pentingnya Penegakan Undang-Undang Fidusia Terhadap Perlindungan Komsumen: Universitas Bandar Lampung.
- AP Wibowo, Z Hasan - Yustisi, 2023 Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press: Jakarta.